

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PRAKATA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC.....	xv
BAB I Menguak Aspek Mutualitas Dibalik Ilegalitas Tata Kelola TKI.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
1.4 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Defini Konseptual	24
1.6 Definisi Operasional.....	26
1.7 Metode Penelitian.....	28
1.8 Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.9 Teknik Analisa Data.....	31
1.10 Sistematika Penulisan Bab	32

BAB II Wilayah Perbatasan dan Kegiatan Perdagangan:

Lokus Pelintasan TKI Ilegal	33
2.1 Batam Sebagai Kawasan Perbatasan Untuk Dilintasi	34
2.2 Profil Tata Kelola dan Mekanisme Pengiriman TKI	38
2.3 Mekanisme Pengiriman TKI	42

BAB III Permintaan Pasar Kewenangan:

Munculnya Pengiriman TKI Ilegal Dalam Tata Kelola TKI	54
3.1 Latar Belakang Kemunculan Pengiriman TKI Ilegal	55
3.2 Murahnya Harga Negara	60
3.3 Menawar Kewenangan	66

BAB IV Legalitas: Komoditi Untuk Ditransaksikan

4.1 Pelanggengan Ilegalitas:	
“Transaksi Jual-Beli Kewenangan”	86
4.2 Bentuk-Bentuk “Transaksi Jual-Beli Kewenangan”	88
4.3 Ilegalitas dalam Tata Kelola TKI	92

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	96
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Daftar Agen Perusahaan Jasa TKI Kota Batam Tahun 2016.....	40
Tabel 2.2: Data Penempatan TKI.....	51
Tabel 3.1: Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi.....	67
Tabel 3.2: Jumlah TKI Menurut Kawasan Tahun 2016.....	70
Tabel 3.3: Daftar Pelabuhan Tikus.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Ilegalitas Dalam Tata Kelola TKI.....	22
Gambar 2.1 Peta Kerawanan Batam	34

Abstrak

Ilegalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah lama dikenal, sudah lama diupayakan, namun tidak kunjung teratasi. Studi ini mempertanyakan mengapa tindakan ilegal dalam proses tata kelola ini tidak kunjung teratasi. Kajian dibatasi hanya pada keterkaitan timbal-balik antar pihak-pihak yang terlibat, dan keterkaitan timbal-balik ini dibayangkan sebagai mekanisme *supply-demand*. Kerangka kajian supply-demand ini dipakai justru karena maraknya penggunaan konsep *governance*, yang mengedepankan mekanisme pasar sebagai acuan penyelesaian masalah. Yang ditambahkan dalam kajian ini adalah bahwa *governance* tersebut berlangsung saat negara yang lemah kapasitasnya.

Untuk menelaah isu ini studi merujuk pada kasus spesifik, relasi aktor dalam tata kelola lalu lalang pengiriman TKI di Batam. Analisa relasi antar aktor dikaji dari data yang digali melalui wawancara kepada aparat pemerintah, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai masyarakat, dan agen perusahaan pengiriman jasa TKI illegal); disamping itu juga melalui observasi di kawasan perbatasan yang menjadi tempat lalu-lalang arus pengiriman TKI secara ilegal.

Pengiriman TKI terus berlangsung, ketika kebutuhan akan lapangan kerja (arus tenaga kerja) dijawab dengan tatakelola liberal, di mana semua aktor dapat memainkan perannya untuk mengelola. Batam sebagai kawasan perbatasan yang dalam sistem perekonomian global diharapkan mempermudah lalu lalang tenaga kerja ke/dari negara tetangga. Pengelolaan lintas-batas tenaga kerja ini juga ditandai oleh lemahnya kemampuan negara untuk mendisiplinkan aparatnya, agar tidak memperdagangkan kewenangannya.

Secara langsung penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku ilegalitas dalam tata kelola TKI di Batam terjadi karena kewenangan dijadikan sebagai komoditi jasa yang dapat diperjual belikan. Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melanggengkan adanya ilegalitas merupakan suatu kewajiban. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ilegalitas bukanlah suatu masalah besar, namun lebih kepada suatu keniscayaan yang memang lumrah terjadi pada setiap orang untuk mengamankan kepentingannya.

Kata Kunci: *Governance*, Batam, Ilegalitas, TKI

ABSTRACT

Illegality on governance has been known long ago and has been strived but it wouldn't resolve. This research questioned why illegal action on this governance process didn't resolved. The outbreak was bordered on mutual linkage of involved parts of governance and this mutual interconnected was imagined as supply and demand mechanism. On supply and demand as a study framework was used it because too much governance concept still used, which putting forward market mechanism as problem solving references. This study added statement that the governance occurred where the capacity was too weak.

For researching this issue, the study referred to specific case, actor relation on regulation of passing through Indonesia labor in Batam. The analyzing of actor relation reviewed based on interviewed to government apparatus, Indonesia labor as a society, and company agent who offer to send illegal labor from Indonesia. On frontier state area has been observed to know the situation of passing through to send the illegal labor from Indonesia.

Indonesia labors were being sent more and more when employments (labor stream) was answered with liberal management. All actors can acted the role as managing the traffic. Batam as frontier areas on global economy system hopefully give an access to make it easier passing through aboard for Indonesia labor. Traffic management on the border state was given a pattern it so weak for the state disciplining the apparatus for use their authority haphazardly.

Directly, this research give the conclude that illegality behavior on Indonesia labor management occurred cause the authority of the apparatus was used as market commodity which it can to be transaction. This research shown that for sustaining illegality on the system was reasonable. This issue told that the illegality was not big deal, But it was for usual behavior on people for fulfill their desire and interest.

Key Words: Governance, Labour, Illegality, Batam